

MENEMUKAN KEMBALI KAPITAL SOSIAL BANGSA INDONESIA

Suryadi dan Haris El Mahdi
Dosen Universitas Brawijaya Malang
Jl. Veteran Malang

ABSTRACT

As a nation-state, Republic of Indonesia has been having the long history. Come from inequality and plurality of tribes, ethnics, and religions; Indonesia effort to fight against Colonialism. In history, this struggle doesn't success before declared Sumpah Pemuda. All of youth organizations in Indonesia declare a vow that Indonesia is one nation, one language and one motherland. This declares is the first movement toward Indonesian unity. In otherwise, Sumpah Pemuda is basic for the power of social capital of Indonesia. In recent time, to fight against all of nationality problems, we must find the power of social capital again. This article further argues that Indonesia has abstract systems – especially Pancasila – as basic and keeper for social capital of Indonesia.

Key words: Sumpah Pemuda, Social Capital, Abstract Systems

PENDAHULUAN

Hendrikus Colijn, veteran perang Aceh dan bekas ajudan Gubernur Jenderal Van Heutz sekitar tahun 1927 – 1928 pernah mempublikasikan sebuah pamflet yang menyebut Kesatuan Indonesia sebagai suatu konsep kosong. Lebih lanjut dia mengatakan, masing-masing pulau dan daerah di Indonesia merupakan etnis yang terpisah-pisah sehingga masa depan jajahan ini tidak mungkin tanpa dibagi dalam wilayah-wilayah¹ (Colijn, 1928).

Anti-thesis dari pernyataan Colijn tersebut, 28 Oktober 1928, para aktivis organisasi kepemudaan berkumpul dan mendeklarasikan apa yang kemudian dikenal sebagai SUMPAH PEMUDA². Sebuah prasetya, Indonesia sebagai tanah-air, satu bangsa dan satu bahasa. Uniknya, 17 tahun kemudian – tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 – Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan yang utuh (minus Papua/Irian Jaya yang direbut beberapa tahun kemudian). Indonesia kini berdiri tegak diatas keragaman suku, ras, bahasa, dan agama.

Penggalan rekam-jejak sejarah Indonesia di atas menunjukkan, kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan komunal secara nasional. Ratusan tahun perjuangan melawan penjajah tidak pernah mencapai keberhasilan karena dilakukan secara kedaerahan, kesukuan dan kepentingan-kepentingan lokal. Sebaliknya, hanya dalam kurun waktu hampir 17 tahun semenjak sumpah pemuda dideklarasikan, Indonesia berhasil merdeka. Hal ini menunjukkan, secara historis Indonesia berhasil merdeka setelah menemukan kapital sosial-nya.

Francis Fukuyama mendefinisikan kapital sosial sebagai berikut :

'Social capital can be defined simply as the existence of a certain set of informal values or norms shared among members of a group that permit cooperation among them' (Fukuyama, 1997).

Permasalahannya – setelah lebih dari setengah abad Indonesia merdeka – spirit kebersamaan, persatuan dan kesatuan yang di bangun melalui sumpah pemuda terlihat mulai terurai dan memudar. Kapital sosial Indonesia menghilang, tidak ada lagi semangat kebersamaan dalam menuntaskan masalah-masalah kebangsaan, seperti: kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, pendidikan, kesehatan, ketimpangan sosial dan sebagainya.

Sebab utama mudarnya kapital sosial terkait dengan model pembangunan yang terkonsentrasi hanya pada pengakumulasian kapital ekonomi – terutama pada masa orde baru. Menurut Lawang (Adnan, 2006) kapital ekonomi tidak sama dengan uang. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Sedangkan kapital ekonomi adalah sebuah kapasitas untuk menata kesempatan atau peluang memperoleh uang (memenuhi kebutuhan). Dalam proses pemenuhan kebutuhan itulah interaksi sosial terjadi dan pertarungan ego selalu tumbuh subur.

Kapital ekonomi mendorong individu/kelompok untuk saling berebut mendapatkan uang atau memenuhi kebutuhan. Hal ini menjadikan hubungan sosial yang dibangun berwatak materialism-individual. Relasi-relasi sosial yang bersifat

¹ Pernyataan ini sangat menyakitkan bagi para pejuang kemerdekaan pada masa itu. Sampai-sampai Soekarno mengatakan: "Usaha untuk kembali memisahkan orang Indonesia satu sama yang lain sebagai Orang Jawa, Orang Sunda, atau Orang Sumatera adalah rekayasa jahat, divide et impera, suatu muslihat yang khas Colijnialism."

² Bung Hatta menyebut momentum Sumpah Pemuda sebagai sebuah "letusan sejarah".

altruistik, demi kepentingan bersama menjadi terabaikan. Strategi pembangunan yang mengedepankan kapital ekonomi – secara signifikan – berimplikasi terjadinya kompetisi (atau bahkan konflik) di masyarakat. Banyak kasus-kasus di lapangan yang menunjukkan, kerusuhan sosial seringkali disebabkan adanya kecemburuan sosial, akibat kesenjangan yang cukup tajam antara si kaya dengan si miskin.(YIIS,2001)

Lebih dari itu, orientasi pembangunan berbasis kapital ekonomi juga memunculkan masalah-masalah sosial yang kompleks. Pembangunan yang hanya berbasis kapital ekonomi ini, pada kenyataannya melahirkan ironi pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, substansi pembangunan mengalami distorsi fungsional, seperti makin tajamnya frekuensi kekerasan dan ketimpangan sosial. Bukti konkretnya adalah terjadinya kerusuhan sosial dan tingginya kriminalitas di banyak tempat.³

Artikel ini bermaksud mengurai dan menjelaskan kapital sosial, memberi argumentasi betapa pentingnya membangun bangsa dengan berbasis pada kapital sosial serta mencoba untuk menggali kembali kapital sosial Bangsa Indonesia yang mulai pudar.

Apa Itu Kapital Sosial?

Konsep kapital sosial didasarkan pada sebuah premis mayor, manusia sebagai makhluk sosial mempunyai naluri alamiah untuk mengikat hubungan pertemanan atau persaudaraan.⁴ Pierre Bourdieu (1986), mendefinisikan kapital sosial sebagai berikut:

“Social Capital as the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition.”(Bourdieu, 1986).

Bourdieu berpandangan, setiap jaringan sosial mempunyai kemampuan mereproduksi kekuatan (*power*) dan keragaman (*inequality*) (Dwyer et.all, 2006). Keragaman (*inequality*) yang tereproduksi dalam sebuah jaringan sosial mempunyai nilai tambah yang menguntungkan dalam hal pembagian “deskripsi kerja” (*job description*) masing-masing individu/kelompok yang terdapat dalam jaringan sosial tersebut.

Kapital sosial berhubungan dengan nilai kolektif dalam sebuah jaringan sosial yang tumbuh-kembang sebagai implikasi dari hubungan-hubungan timbal balik yang terjadi didalamnya. Nilai kolektif inilah yang secara “alamiah” menciptakan dan mempertahankan kapital sosial. Bertambah, berkurang ataupun bertahannya kapital sosial tergantung dari nilai kolektif yang ada dalam sebuah jaringan sosial. Lebih jauh, Putnam, penggagas awal kapital sosial (meski bukan yang original) mendefinisikan kapital sosial sebagai :

³ Tingginya kriminalitas dan kerusuhan sosial di Indonesia dapat disimak pada semakin maraknya tayangan-tayangan reality-show televisi yang berisi berita dengan muatan tindakan kriminalitas, seperti : BUSER, SERGAP, BRUTAL dan yang sejenisnya. Sementara itu, kerusuhan sosial (anarkhisme) juga banyak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, mulai dari yang disebabkan konflik sosial sampai karena amok massa.

⁴ Dalam prespektif Darwinisme, manusia dipandang mempunyai “insting” berjuang untuk hidup (*struggle for life*). Naluri ini mendorong manusia saling bersaing memperebutkan sumberdaya alam agar tetap *survive*. Bagi Darwinism, individu yang telah mencapai kesempurnaan sajalah yang sanggup menjadi penguasa dan bertahan di muka bumi. Kapital sosial merupakan anti-tesis dari pandangan Darwinisme ini.

“Social Capital is features of social organization such as networks, norms, and social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit”
(Putnam, 1995).

Kapital sosial lebih mengarahkan membangun masyarakat (dan juga negara) dengan menggali potensi sumberdaya sosial berupa koneksitas yang saling menguntungkan dalam sebuah jaringan sosial.

	The Classical Capital Theory	The Neo-Capital Theories			
		Human Capital	Cultural Capital	Social Capital	
Theorist	Marx	Schultz, Becker	Bourdieu	Lin, Burt, Marsden, Flap, Coleman	Bourdieu, Coleman, Putnam
Explanation	Social relations: Exploitation by the capitalists (bougnoise) of the proletariat.	Accumulation of surplus value by laborer	Reproduction of dominant symbols and meanings (values).	Access to and use embedded in social networks	Solidarity and reproduction of group
Capital	A. Part of surplus value between the use value (in consumption market) and the exchange value (in production-labor market of the commodity) B. Investment in the production and circulation of commodities.	Investment in technical skills and knowledge	Internationalization or misrecognition of dominant values	Investment in social networks	Investment in mutual recognition and acknowledgment
Level of analysis	Structural (classes)	Individual	Individual/class	individual	Individual or group

Secara bangunan teoritis, Lin (1999) memasukkan teori tentang kapital sosial ini dalam bingkai *“The Neo Capital Theories”* (lihat Tabel). Lin sendiri – berbeda dengan Bourdieu dan Putnam – melihat kapital sosial lebih cenderung dalam perspektif individual, yakni seberapa jauh kemampuan individu/ kelompok dalam mengakses untuk/dan menggunakan sumberdaya sosial yang tersimpan (*embedded*) pada sebuah jejaring sosial. Kapasitas individu/kelompok tersebut dalam mengakses sumberdaya sosial akan memperkuat sekaligus mempertahankan eksistensi dirinya.

Bagi Lin, setiap komunitas atau kelompok sosial pasti mempunyai simpanan sumber daya (*embedded resouces*) sosial. Individu yang mampu menggali, mengumpulkan dan memanfaatkan sumber daya sosial inilah yang bisa menikmati kapital sosial. Karena itu, Lin menganjurkan, untuk memperbanyak/memperkaya kapital sosial, individu harus melakukan banyak investasi pada jejaring sosial. Investasi sosial ini bisa berupa: aktif dalam organisasi-organisasi sosial; memberi

penghargaan, bantuan atau empati pada kolega; memperluas jaringan sosial dengan membuka perkenalan dan pertemanan baru atau suasana (tempat) baru.

Putnam (2000) membagi kapital sosial (baca: koneksi) dalam dua bentuk, yaitu:

1. **Bonding**, berhubungan dengan bentuk koneksi yang bersifat intim, melekat dan kuat. Koneksi seperti ini dapat terwujud dalam jaringan sosial yang bersifat homogen.
2. **Bridging**, berhubungan dengan bentuk koneksi yang lebih bersifat longgar, terbuka dan plural. Koneksi seperti ini dapat terwujud dalam jaringan sosial yang bersifat heterogen.

Menurut Putnam, *Bridging Social Capital* harus terus dijaga dan dipertahankan, karena mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat, pemerintah, individu dan komunitas.

Singkatnya, kapital sosial diakui mempunyai pengaruh yang besar mulai dari peningkatan perekonomian dan penanggulangan kemiskinan (Rudy, 2006; Hayami, 1997; dan Quillian, 2006), sampai terciptanya masyarakat madani (*civil society*) [Putnam, 1993; Burt, 2000; De Fillipis, 2001; Dwyer, et.al, 2006; dan Fukuyama, 1999].

Trust: Menemukan Kembali Kapital Sosial Indonesia yang Terpendam

Dalam buku *The Great Disruption* (2002), Fukuyama mengajukan beberapa data lapangan yang menunjukkan bahwa hubungan kerjasama adalah sebuah keniscayaan bagi komunitas manusia. Terdapat tiga item paralel bagi terwujudnya kapital sosial yang tangguh, yaitu *Trust* (kepercayaan), *Reciprocity* (hubungan timbal balik) dan *Collectivity* (aksi bersama).

Menurut Fukuyama, *trust* (kepercayaan) merupakan pondasi utama sekaligus pengikat bagi terjalinnya kerjasama (*cooperation*) dan koordinasi (*coordination*). Adanya kepercayaan (*trust*) memungkinkan terwujudnya hubungan timbal balik dan aksi bersama yang bersifat *genuine*, didorong atas dasar kebutuhan komunitas, dan mampu menggerakkan seluruh potensi kapital sosial yang terpendam.

Karena itu, para teoritikus sosial sepakat, kepercayaan (*trust*) adalah sesuatu yang elementer dalam memperkuat dan mereproduksi kapital sosial. Giddens (Juliawan, 2000) membagi *trust* dalam dua tipe yang satu sama lainnya saling terkait, yaitu :

1. **Trust terhadap abstract systems**, yakni kepercayaan (*trust*) yang terbangun sebagai implikasi dari berfungsinya institusi-institusi publik atau pranata-pranata sosial dengan baik.
2. **Trust terhadap personal**, kepercayaan (*trust*) yang terbangun sebagai implikasi adanya interaksi intim dan terus-menerus antara individu yang satu dengan individu yang lain.

Kedua tipe *trust* tersebut saling berhubungan, tak dapat dipisahkan.

Karena itu, dalam menggali dan mengangkat kembali kapital sosial Bangsa Indonesia yang terpendam perlu dirajut kepercayaan (*trust*) dari masing-masing elemen bangsa. *Trust* merupakan media dan langkah awal dalam mengikat '*Bridging Social Capital*'⁵ yang dimiliki Indonesia. Indonesia pernah membuktikan – melalui

⁵ Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai kekayaan *Bridging Social Capital* melimpah. Enam agama resmi yang diakui dengan beragam variasi kelompok didalamnya, ratusan suku bangsa dan ras, dan jutaan penduduk merupakan wujud dari betapa kayanya negeri ini dalam hal *Bridging Social Capital*.

perjuangan melawan penjajah – kapital sosial yang dimiliki Indonesia sangat dahsyat “luar biasa”

PANCASILA: ABSTRACT SYSTEMS YANG HARUS DIHAYATI KEMBALI

Seperti diuraikan, untuk mengikat *Bridging Social Capital* dibutuhkan sebuah *abstract system*, yang dipercaya dan diakui sebagai nilai-nilai kolektif. Dalam konteks ini, Indonesia sangat beruntung karena mempunyai Pancasila, dengan semua silanya yang lima itu adalah suatu kesatuan yang utuh, tidak boleh dan tidak bisa dipisahkan unsur-unsurnya. karena itu, pelaksanaan Pancasila⁶ jugaharuslah utuh, tanpa ada tekanan pada salah satu silanya secara tidak beralasan (Madjid, 1997). Namun demikian, untuk menggali maknanya secara mendalam, kita harus menyelami setiap sila tersebut.

I. Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa,

Sila ini merupakan ruh/spirit kebangsaan, yang memproklamirkan, manusia Indonesia berwatak religius – percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan (bahasa Arab: *Ilah*) dapat kita maknai sebagai sesuatu yang dijadikan idola, sandaran hati atau tempat bergantung manusia. Dalam pengertian ini, kepercayaan kepada Tuhan merupakan sesuatu yang bersifat naluriyah dalam diri setiap manusia.

Bahkan, seorang atheis sekalipun, sejatinya dia mempunyai Tuhan – sesuatu yang menjadi sandaran hatinya. Entah Tuhan-nya itu berwujud uang atau kekayaan materi; alam atau bagian-bagian spesifik dari alam, seperti : matahari, bintang, gunung, dsb; dan Tuhan itu juga bisa berwujud manusia atau kemanusiaan (humanisme) – atau dalam bahasa lain menuhankan dirinya sendiri (eksistensialisme). Singkatnya, tak ada satupun manusia di jagad ini yang tak bertuhan atau tidak mempercayai Tuhan. Manusia senantiasa rindu untuk memuja sesuatu yang menjadi tumpuan hatinya – apapun wujudnya.

Lebih dari itu, kepercayaan pada Tuhan memberikan spirit bagi manusia untuk memaknai hidup. Manusia yang menjadikan uang atau kekayaan materi sebagai Tuhan, hidup akan dimaknainya sebagai kesempatan untuk mengumpulkan uang atau kekayaan materi sebanyak-banyaknya. *Time is money*, demikian semboyan para pemuja uang. Bagi mereka, uang dapat menyelesaikan segala-galanya, dapat menuntaskan setiap permasalahan yang ada.

Demikian halnya para pemuja alam. Mereka menganggap bahwa alam semesta yang terhampar luas mempunyai “kecerdasan agung.” Pergantian siang dan malam, butiran-butiran air (hujan) yang turun dari langit, keindahan pemandangan di bawah laut, kesetimbangan tata-aturan semesta, dan beragam fenomena alam lainnya dipahami sebagai kecerdasan dan kekuatan misterius alam. Setiap detik, para pemuja alam ini, tak henti-hentinya takjub dan kagum terhadap keindahan dan kekuatan alam. Kemudian, dibuatlah sistem ritual untuk memuja alam.

Singkatnya, umur setiap manusia di dunia ini dihabiskan hanya untuk memuja Tuhan, sesuai yang menjadi kepercayaannya. Bahkan, manusia rela berkorban, dan tahan menderita demi mengagungkan kebesaran Tuhannya.

Tetapi, Pancasila memandang, kepercayaan selain kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah palsu. Menjadikan hati manusia tertekan dan terbelenggu. Karena itu,

⁶ Pancasila yang sekarang berasal dari Piagam Jakarta yang merupakan persetujuan antara 9 pemimpin Indonesia, Yaitu: Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, H. Agussalim, Achmad Subardjo, Wachid Hasyim, dan Muhammad Yamin, yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, tujuh kata yang mengiringi sila pertama dihilangkan, terutama untuk mengurangi kecurigaan pihak minoritas non-muslim terhadap mayoritas muslim

manusia harus membebaskan dirinya dari kepercayaan kepada Tuhan-Tuhan palsu itu.

Manusia religius yang beriman senantiasa menghadirkan Tuhan Yang Maha Esa dalam hatinya⁷, *locus* paling *private* dari dirinya. Hati adalah tempat paling rahasia dan tersembunyi yang dimiliki manusia. Hanya Tuhan Yang Maha Esa sajalah yang tahu-persis isi hati manusia. Di ruang rahasia dan penuh misteri inilah Tuhan Yang Maha Esa dengan seluruh sifat-sifatnya yang indah bersemayam menjadi spirit manusia beriman.

II. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,

Sila ini merupakan watak-kepribadian bangsa. Tanpa berwujud kemanusiaan yang adil dan beradab, keimanan seseorang belum dinyatakan sah dan dapat dipertanggung-jawabkan. Artinya bukti nyata dalam kehidupan seseorang itu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah memanifestikannya dalam bentuk kepribadian yang adil dan beradab.

Manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa pasti tak bisa mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini dikarenakan hatinya dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan diri, sehingga tak mungkin dia bisa menjadi manusia yang adil dan apalagi beradab. Keadilan dan keberadaban membutuhkan manusia yang di dalam hatinya ber"semayam" Tuhan Yang Maha Esa. Singkatnya, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab bersifat manunggal, satu paket yang tak bisa dipisah-pisahkan.

Adil di sini bermakna menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya secara proporsional. Hal ini tentu berbeda dengan konsep sama-rata, sama-rasa ala Komunis. Setidak-tidaknya terdapat tiga (obyek) yang manusia harus bersikap adil terhadapnya, yaitu:

1. *Adil terhadap diri-sendiri*, setiap manusia mempunyai batas-kemampuan dan potensi diri. Karena itu, tidak adil jika manusia membebani dirinya dengan sesuatu yang melampaui batas kemampuan dan potensi diri.
2. *Adil terhadap orang lain*, perlu menyadari setiap manusia juga mempunyai batas kemampuan dan potensi – seperti halnya yang berlaku pada dirinya – tidak layak bagi seseorang membebani orang lain di luar batas kemampuan dan potensi dirinya.
3. *Adil terhadap lingkungan/alam*, seperti halnya manusia, lingkungan/alam juga mempunyai batas kemampuan dan potensi. Ketidakadilan dalam memanfaatkan kemampuan dan potensi lingkungan/alam pasti akan berdampak pada kerusakan dan bencana.

Ketiga obyek di atas mempunyai hubungan yang manunggal, tak bisa dipisah-pisahkan. Seseorang – disamping harus adil terhadap diri sendiri – juga harus adil terhadap orang lain dan lingkungan/alam.

Keadilan (dan kebenaran) ini hanya dapat ditegakkan manusia yang beradab, yaitu manusia yang mengikuti adab (tata-aturan/hukum). Tak mungkin keadilan bisa tegak-kokoh dalam kehidupan, jika manusia yang menjalankan keadilan itu tak beradab, tak berazas pada tata-aturan hukum kebenaran. Karena itu, hukum kebenaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa harus menjadi acuan manusia yang beradab.

Di samping itu, beradab juga bermakna watak moral, sopan santun, tata-krama atau budi pekerti luhur. Dalam bahasa Arab disebut *akhlaq-ul karimah*. Keadilan

⁷ Hati di sini adalah bagian dari diri manusia yang bersifat spiritual bukan hati dalam pengertian anatomis.

mencerminkan derajat *akhlaq* seseorang atau bangsa. Karena itu, keadilan harus ditegakkan dengan berazas pada budi pekerti luhur, tidak semena-mena atau sewenang-wenang, yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.

III. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia.

Sila ini merupakan ikatan kebangsaan. Bagaimanapun sekumpulan manusia beriman dan berperilaku luhur tak akan berarti-guna secara sempurna dalam kehidupan jika bergerak sendiri-sendiri, tercerai-berai. Sebagaimana ungkapan orang bijak :*"kebaikan akan mudah dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisasi rapi."* sebab itu sekumpulan manusia beriman dan berperilaku luhur tersebut perlu diorganisasikan dalam bentuk perikatan. Di sinilah pentingnya persatuan. Tanpa persatuan nilai-nilai luhur kemanusiaan tak mudah dilaksanakan secara konkret.

Namun perlu dicatat, persatuan bukan berarti harus memberangus kebhinekaan – yang memang sudah menjadi ciri Bangsa Indonesia. Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang dicengkerem erat Burung Garuda harus pula digenggam setiap anak bangsa. Persatuan tidak harus dipahami sebagai keseragaman dan/atau memaksakan keseragaman dalam setiap hal. Persatuan juga tak bisa kokoh jika diikat uang/kekayaan materi dan pemaksaan kekuasaan (seperti dalam masyarakat komunis).

Persatuan harus ditumbuhkan dan diikat dari dalam hati yang tulus. Terikat kuat karena tumbuh dari perasaan sesakit penderitaan dan senasib sepenanggungan tanpa memperhatikan asal-usul, suku-ras, dan agama. Sebuah ikatan yang memandang setiap anak bangsa yang hidup di bumi Nusantara adalah saudara. Oleh karena itu, Suku Aceh, Nias, Sunda, Jawa, Bali, Dayak, Bugis, Sasak, Asmat, dan suku-suku lainnya yang mendiami Indonesia harus menyadari, keberadaannya berasal dari satu rahim, yaitu rahim Ibu Pertiwi.

Dikarenakan adanya pertalian saudara ini, apabila suku Aceh menangis maka seluruh bangsa akan menangis pula. Jika suku Asmat menderita maka seluruh bangsa juga turut merasakan penderitaan itu.

Oleh karena itu, spirit Sumpah Pemuda harus tetap dilestarikan sebagai modal membangun persatuan sejati, bukan persatuan semu atau palsu belaka. Persatuan yang lahir dan tumbuh dari kebhinekaan.

IV. Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Sila ini merupakan alat atau cara mewujudkan visi agung kebangsaan dan sering juga disebut sebagai sila demokrasi. Persatuan saja tidak cukup dalam menuntaskan masalah-masalah besar yang berkaitan dengan hidup berbangsa dan bernegara. Penuntasan masalah harus dilakukan melalui mekanisme musyawarah/permusyawaratan, yang membicarakan setiap kepentingan/masalah kebangsaan dengan duduk bersama.

Musyawarah merupakan satu-satunya media paling sah dan shahih untuk menyelesaikan permasalahan dan/atau silang-sengketa pendapat. Setiap permasalahan dan/atau silang-sengketa pendapat yang diselesaikan tanpa mekanisme musyawarah berpotensi menimbulkan konflik sosial yang bisa mengarah pada perpecahan bangsa. Di sinilah pentingnya musyawarah, sebagai media mempertemukan aneka ragam pendapat guna menguji kebenaran.

Namun untuk alasan kepraktisan, seluruh rakyat tidak bisa serta-merta ikut musyawarah. Suara/kepentingan rakyat disalurkan melalui lembaga-lembaga permusyawaratan yang disepakati bersama secara sah dan adil. Lembaga-lembaga

permusyawaratan ini beranggotakan para perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia yang dipilih melalui mekanisme Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lembaga-lembaga permusyawaratan itu adalah DPR dan DPD ditingkat nasional, dan DPRD di tingkat daerah. Di tingkat desa terdapat lembaga perwakilan yang bernama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Selanjutnya, disebabkan spirit keberimanan dan watak budi pekerti luhur yang terbingkai dalam persatuan, musyawarah harus mempunyai tata-aturan atau prinsip-prinsip yang menunjukkan kualitas peserta musyawarah sebagai manusia beriman yang adil dan beradab serta bersatu. Setidak-tidaknya terdapat 8 prinsip yang harus dipegang dalam bermusyawarah, yaitu:

1. Agenda yang dibicarakan dalam musyawarah/permusyawaratan tidak diperkenankan bertentangan atau bertolak belakang dengan “kebenaran-kebenaran universal” yang ada dalam setiap agama.
2. Setiap peserta musyawarah mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama dalam mengajukan pendapat, baik itu berupa usul, masukan maupun keberatan atau ketidak-setujuan.
3. Penyampaian pendapat harus dilakukan dengan penuh ketulusan dan hormat terhadap peserta musyawarah yang lain. Tidak emosional, apalagi menyinggung perasaan peserta yang lain.
4. Dalam musyawarah tidak diperkenankan menganggap pendapatnya yang benar dan pendapat orang lain salah. Kesadaran rela mendengar atau mendapat kebenaran dari pihak lain dan mengakui kesalahan pendapat diri merupakan sarana terbaik bagi penghargaan terhadap kebhinekaan/keragaman.
5. Di saat keputusan akhir musyawarah bertentangan dengan pendapat diri, keputusan itu harus diterima dengan lapang dada, tidak perlu ada usaha penghasutan atau pemboikotan hasil musyawarah, yang bisa memecah-belah peserta musyawarah.
6. Keputusan musyawarah merupakan perjanjian tertinggi yang berkekuatan tetap dan final bagi peserta musyawarah. Karena itu tidak diperkenankan melaksanakan tindakan yang menyalahi keputusan musyawarah.
7. Pemimpin musyawarah berfungsi sebagai penengah/wasit sekaligus “pengetok palu” keputusan musyawarah. Sebab itu, pemimpin musyawarah haruslah orang yang cakap, bijak, visioner dan sudi mendengar setiap pendapat peserta musyawarah secara sungguh-sungguh.
8. Keputusan akhir musyawarah harus berpijak pada hikmat-kebijaksanaan. Hikmat – berasal dari Bahasa Arab : kearifan/arif – dan bijaksana mengandung pengertian, keputusan harus mempertimbangkan kebenaran dan kepentingan yang lebih luas, kepentingan masyarakat umum. Bukan sekedar kepentingan peserta musyawarah itu sendiri.

V. Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sila inilah yang menjadi visi agung kebangsaan. Tak ada artinya sebuah bangsa berdiri atau didirikan tanpa tujuan. Karena tujuan berdirinya bangsa Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Visi kebangsaan ini sekaligus menjadi tujuan musyawarah yang dilakukan sekumpulan orang beriman dan berbudi luhur, yang terikat dalam persatuan.

Keadilan sosial mempunyai makna dan implikasi yang sangat luas. Hal ini terkait pada fungsi manusia sebagai makhluk sosial-yang diharuskan merajut interaksi-interaksi sosial dengan manusia lainnya-berdasar motif-motif tertentu yang meliputinya. Interaksi antar individu yang didasarkan atas untuk memenuhi

penghidupan yang layak akan menghasilkan hubungan sosial berwatak ekonomis. Interaksi antar individu yang didasarkan atas motif mengembangkan kecerdasan akan menghasilkan interaksi sosial di bidang pendidikan. Interaksi antar individu yang didasarkan meraih dan atau mempertahankan kekuasaan menghasilkan hubungan sosial di lapangan politik. Interaksi antar individu yang didasarkan motif menjaga keteraturan dan ketertiban masyarakat akan menghasilkan hubungan sosial berkaitan pada penegakan hukum. Sedang interaksi antar individu bermotif mengembangkan kehidupan seni, budaya dan sosial menghasilkan hubungan sosial dalam bingkai sosial-budaya.

Karena itu, keadilan sosial berarti juga mencakup didalamnya keadilan di bidang ekonomi, pendidikan, hukum, politik, dan keadilan dalam kehidupan sosial-budaya. Keadilan ini harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

SIMPULAN

Dalam tulisan ini, penulis telah memberikan argumentasi, menuntaskan masalah-masalah kebangsaan di Indonesia, tidak bisa jika hanya mengandalkan kapital ekonomi. Rezim Orde Baru cukup menjadi bukti, orientasi yang sepihak pada kapital ekonomi akan berdampak pada kerapuhan bangsa secara kolektif. Bagi penulis, konsepsi kapital sosial layak dijadikan alternatif membangun Indonesia dan kita harus berjuang bersama-sama secara kolektif merajut kembali *social-networks* di masyarakat yang sekarang ini tampaknya sudah mulai pudar.

Karena itu, nilai-nilai agung Pancasila harus kembali digali dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Hal ini penting karena Pancasila merupakan tali pengikat kebangsaan atau sebuah *abstract system* dalam pandangan Giddens, dan *trust* terhadap *abstract system* merupakan kunci untuk mengembalikan kapital sosial Bangsa Indonesia

DAFTAR RUJUKAN

- Adnan, Ricardi. S, 2006 “*Potret Suram Bangsaaku, Gugatan dan Alternatif Desain Pembangunan*”, Universtas Indonesia Press.
- Burt, Ronald S, 2000. *The Network Structure of Social Capital*, in Research in Organizational Behaviour, Volume 22, Greenwich, C.T, JAI Press.
- Bourdieu, Pierre, 1986. “*The Forms of Capital*”, in Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, edited by John G . Richardson. Westport, CT.: Greenwood Press.
- Colijn, Hendrikus, 1928. *Koloniale Vraagstukken van Heden en Morgen*, Amsterdam: De Standard.
- De Fillipis, James, 2001. *The Myth of Social Capital in Community Development*, in Housing Policy Debate, Volume 12 issue 4, Fannie Mae Foundation.
- Dwyer, Claire et.all, 2006. “*Ethnicity as Social Capital? Explaining the Differential Educational Achievements of Young British Pakistani Men and Women*”, Paper

presented at the 'Ethnicity, Mobility and Society' Leverhulme Programme Conference at University of Bristol, 16-17 March.

Fukuyama, Francis, 1999. *Social Capital and Civil Society*, prepared delivery at the IMF Conference on Second Generation Reforms,

-----, 2002. *The Great Disruption, Human Nature and the Reconstitution of Social Order*, Profile Books, London.

Hayami, Y, 1997. *Development Economic: From the Poverty to the Wealth of Nations*, Oxford: Clarendon Press.

Juliawan, B. Harry, 2000. *Dunia yang Berlari*, dalam Majalah BASIS Nomor 01 – 02, tahun ke 49, Januari – Februari.

Lin, Nan, 1999. *Building a Network Theory of Social Capital*, paper was presented as the Keynote Address at the XIX International Sunbelt Social Network Conference, Charleston, South Carolina, February 18-21.

Madjid Nurcholish. 1997. *Pelaksanaan Pancasila dan Demokrasi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional*, dalam Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, PARAMADINA, Jakarta.

Nababan, Abdon, 1995. *Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*, makalah disajikan dalam Seminar Setengah Hari, kerja sama CSIS dan Yayasan SEJATI dalam rangka Merayakan Setengah Abad Kemerdekaan, dengan tema: "Kebudayaan, Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan", Jakarta 7 Agustus 1995.

Putnam, Robert. D, 1995. "Bowling alone: America's declining social capital", *Journal of Democracy* 6:1, January 1995.

-----, 1993. *Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton University Press, New Jersey.

-----, 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. NY: (ed.) Simon and Schuster.

Quillian, Lincoln, 2006. *Can Social Capital Explain Persistent Racial Poverty Gaps?*, Paper prepared for The Colors of Poverty, June, 12, 2006.

Rudy, 2006. *Hilangnya Ruang Publik: Ancaman bagi Kapital Sosial di Indonesia*, dalam Jurnal INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006.

Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial (YIIS), 2001. *Kerusuhan-Kerusuhan Sosial di Indonesia*, dalam Jurnal Sosiologi Indonesia No 5/2001.